

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik atas APBD dan APBN. Sekarang terdapat perhatian yang sangat besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010 diterbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan tidak berlaku lagi. Perubahan pencatatan akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.



Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 “Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan”.

Akuntansi berbasis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual lebih menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dapat dipercaya dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Tujuan penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik adalah untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Di Indonesia seluruh organisasi sektor publik harus menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai entitas pelaporan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual tersebut sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga mengamanatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015. Dan diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK No.05 Tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan SAP pada Pemerintahan Indonesia diyakini akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga Informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Tahun 2015 merupakan pertama kali diretapkannya akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia. Namun, terdapat kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Salah satu kendala yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas. Hal itu disebabkan karena adanya pos-pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau harus menerapkan akuntansi berbasis akrual pada pencatatan dan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Sehingga peneliti ingin mengetahui implementasi akuntansi berbasis akrual pada KANWIL DITJEN Perbendaharaan Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat dan mengkaji judul tentang **“Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan suatu perumusan masalah yakni “Bagaimana implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau?”.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau telah sesuai dengan SAP.

2. Manfaat Penelitian

Seorang peneliti tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari hasil penelitian, baik itu dari diri sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru dan evaluasi serta perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi dilapangan.
- c. Bagi penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan landasan penelitian untuk penelitian berikutnya terutama yang terkait akuntansi berbasis akrual.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Riau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 8 Februari 2018 sampai 9 Maret 2018.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara secara langsung maupun observasi dengan responden yang ada kaitannya dengan objek tugas akhir. Dalam rangka memperoleh data sekunder yaitu dengan bagian Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) dari Kanwil DJPB Provinsi Riau.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dalam bentuk sudah jadi berupa laporan keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau tanpa mengalami perubahan..

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiono, 2010).

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan atau mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan mengenai data yang ada maupun belum penulis peroleh dari Instansi.

b. Observasi

Observasi adalah mendapatkan data dengan jalan mengamati masalah yang bersangkutan secara langsung. Dalam hal ini akan akan diamati hal-hal yang diteliti, sehingga penulis mendapatkan gambaran yang nya dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data dengan jalan mengambil data yang ada dalam catatan instansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Analisis Data

Data penulis yang dikumpulkan kemudian diteliti kesesuaiannya dengan SAP. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif, data disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk diteliti berdasarkan norma - norma yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan diambil kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang landasan deskripsi objek penelitian dan analisis data.

BAB IV

KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA